

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan tuntutan perkembangan sistem keuangan dan kemajuan ekonomi yang semakin kompleks, perubahan akan penggunaan laporan keuangan menjadi salah satu agenda pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Hal ini ditandai dengan terjadinya reformasi yang menghasilkan suatu kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Pada tahun 1999, pemerintah menerbitkan UU Nomor 25 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pedoman terkait desentralisasi fiskal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, memberikan kewenangan penuh pengelolaan keuangan daerah kepada gubernur / bupati / walikota untuk menyusun laporan keuangan masing-masing daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang wajib disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Namun, hingga saat itu belum ada standar

baku yang mengatur penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Gagasan akan kebutuhan SAP di Indonesia, melahirkan terbentuknya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004. Produk yang dihasilkan dan disempurnakan oleh KSAP menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Pada tahun 2010 terbit PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP Nomor 24 tahun 2005.

Masih buruknya pembenahan pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun daerah saat ini tidak terlepas dari faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan yang masih tergolong baru di lingkungan pemerintah. Adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum. Hal ini selaras dengan penelitian Sulani (2009) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus memiliki sumber daya manusia yang mampu menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan PP No.24.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Pendidikan

dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. Hal ini sejalan dengan penelitian Utomo (2012) yang menyatakan bahwa sebagian besar pegawai negeri bagian keuangan tidak berasal dari latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisinya serta belum memahami sepenuhnya tentang akuntansi. Pengembangan pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan untuk mempermudah pegawai dalam mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan. Ketidakpahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan.

Selain itu, dalam suatu organisasi termasuk di dalam lingkungan pemerintahan dibutuhkan komitmen masing-masing perangkat daerah dalam mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku umum dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kinerja yang optimal dari pegawai yang mencakup pada komitmen

sebagai bentuk pertanggungjawaban pegawai pemerintah dalam tugas dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada menjadi salah satu kendala terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip akuntabel dan transparan. Komitmen organisasi akan tercipta apabila seseorang mampu untuk memiliki sikap yang berhubungan dan bersinergi dengan organisasi tempat mereka bergabung. Sikap ini berkaitan dengan persepsi tujuan organisasi dan keterlibatannya dalam melaksanakan kerja. Menurut Sulani (2009) “pegawai pemerintah yang berkomitmen akan memiliki pemahaman atau penghayatan terhadap penyusunan pelaporan keuangan sesuai dengan SAP”.

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi yang dapat meningkatkan kinerja seseorang. Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung pelaksanaan kerja sehingga pegawai memiliki semangat bekerja dan ikut mendorong motivasi kerja dirinya. Sebaliknya lingkungan kerja yang kurang baik akan menurunkan kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sinurat (2010), dengan variabel penelitian meliputi pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan, serta partisipasi dalam penyusunan LKPD. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menambahkan dua variabel yaitu komitmen dan lingkungan kerja.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Lingkungan Kerja, Komitmen, serta Pendidikan dan Pelatihan terhadap Partisipasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih rendahnya kemampuan pemahaman perangkat daerah dalam menguasai dan menyusun laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Komitmen yang rendah dalam memahami penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Terbatasnya perangkat daerah yang memiliki kualifikasi terkait pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan.
4. Apakah terdapat hubungan signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan, lingkungan kerja, komitmen, serta pendidikan dan pelatihan terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari uraian di atas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya menguji faktor pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, komitmen, lingkungan kerja,

pendidikan dan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintah kota Medan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Medan?
2. Apakah komitmen berpengaruh terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Medan?
3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Medan?
4. Apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Medan?
5. Apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, komitmen, lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Medan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Medan.

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Medan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Medan.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP, lingkungan kerja, komitmen, serta pendidikan dan pelatihan terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Medan.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan menambah informasi bagi penelitian selanjutnya.